

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 19 April 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanagara  
NIK/NIDN/NIRA : 10291008 / 0319046402 / 990815721099915512  
Jenjang Jabatan Akademik: Profesor/IVE  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status perkawinan : Menikah  
Nama Istri : Marni  
Nama Anak : 1. Endah Arini  
2. Sae Mulyawan Dwirama  
3. Agung Valerama  
4. Aisyah Ayunda Arini  
  
Alamat : Perumahan Merpati Blok O No. 18 Jl. Peta Utara  
Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta  
Barat.  
Telepon /HP : R. 5555159, HP. 087775255683  
K. 5604477, 5671748.  
Website : untar.ac.id  
e-mail : rasji@fh.untar.ac.id

### **Pendidikan Formal:**

1. Sekolah Dasar Negeri Sidamulya Indramayu, lulus tahun 1976.
2. Sekolah Mengengah Pertama Negeri Haurgeulis Indramayu, lulus tahun 1979.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri Kandanghaur Indramayu, lulus tahun 1982.
1. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, lulus tahun 1991.
2. Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, lulus tahun 1997.
3. Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, lulus tahun 2019.

### **Pendidikan Non-Formal:**

1. Penataran sebagai Dosen di Pusat Sumber Belajar Universitas

- Tarumanagara Jakarta tahun 1992.
2. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Untuk Penatatar Tingkat I Nasional pola 144 jam di BP.7 tahun 1993.
  3. Pelatihan Teknik Perundang-undangan, diselenggarakan oleh FH Untar, 1993.
  4. Pelatihan Penelitian Ilmiah, diselenggarakan oleh Pusat Sumber Belajar Untar, 1997.
  5. Pelatihan Penyuntingan dan pengelolaan Jurnal Ilmiah, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 1998.
  6. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, diselenggarakan oleh Pusat Sumber Belajar Untar, 1998.
  7. Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Terakreditasi diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2008.
  8. Pelatihan pengelolaan Jurnal Ilmiah menuju Terakreditasi, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi tahun 2010.
  9. **Pendidikan dan Pelatihan Arbiter Ad Hoc bersertifikat**, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2010.
  10. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Dikti 2001.
  11. Pelatihan Training of Trainer Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kopertis III Jakarta, 2013.
  12. Pelatihan Penyamaan Asesor Beban Kerja Dosen, Atmajaya Jakarta, 2018.
  13. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) bersertifikat, Jakarta: UNJ 11-16 Juli 2022
  14. Pelatihan Applied Approach (AA) Kedosenan bersertifikat, Jakarta: UNJ 8-12 Agustus 2022.
  15. Pelatihan Training of Trainer (TOT) Pekerti bersertifikat, Jakarta: UNJ, 12, 13, dan 15 September 2022.

**Pengalaman kerja:**

1. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang.
2. Pemuda Pancamarga Kabupaten Indramayu, 1986-sekarang,
1. Penyuluh dan konsultan hokum pada Proyek Penyusunan dan Konsultasn Hukum yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 1998.
2. Anggota Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kotamadya Jakarta Barat pada Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota MPR, DPR, dan DPRD pada tahun 1999.
3. Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara periode tahun 2000-2004.
4. Anggota Senat Universitas Tarumanagara periode tahun 2000-2004.
5. Pelaksana Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.
6. Peneliti pada proyek penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 20001.
7. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara, 2002-sekarang,

8. Staf Rektor Universitas Tarumanagara Bidang Pembuatan Peraturan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.
9. Peneliti pada Proyek Pengawasan Pelaksanaan Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Beras Miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, tahun 2003.
10. Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tahun 2003-2004.
11. Tim Ahli pada proyek Pemeriksaan Dokumen Hukum Terbatas atas aset yang perbankan eks Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pengelola Aset Perbankan yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) pada tahun 2004.
12. Pembantu Dekan Bidang Akademik (Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
13. Anggota dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara periode tahun 2004-2008.
14. Konsultan Hukum Christian Children's Found (CCF) Indonesia, tahun 2004-2007.
15. Ketua Tim Kurikulum Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum se-Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bantek, tahun 2006-1007.
16. Konsultan Hukum pada Proyek Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Jalan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tahun 2007.
17. Konsultan Hukum pada Proyek Penilaian Perjanjian Kerjasama dan Addendum Perjanjian Kerjasama, Badan Penanaman Modal Dan Pendayagunaan Kekayaan Dan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta, tahun 2008.
18. Penyusun proposal dan tim pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2009-2010.
19. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum tahun 2008-2012.
20. Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
21. Anggota Senat Universitas Tarumanagara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
22. Konsultan Hukum pada Proyek Penyusunan Peraturan Daerah PMP pada PT. Patungan, Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tahun 2009.
23. Wakil Rektor Bidang Organisasi, Administrasi, dan Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2012-2016.
24. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tarumanagara, April-Juli tahun 2014.
25. Ketua Tim Penyusunan Statuta Universitas Tarumanagara, tahun 2012.
26. Penyusunan proposal Pembukaan Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2016.
27. Ketua Tim Penyusunan Statuta Universitas Tarumanagara, tahun 2014-2016.
28. Wakil Rektor Bidang Non Akademik Universitas Tarumanagara, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;

29. Laision officer Yayasan Tarumanagara dengan Universitas Tarumanagara, tahun 2016 sampai dengan sekarang;
30. Ketua Tim Akreditasi Institusi Universitas Tarumanagara, tahun 2017.
31. Pengurus Asosiasi Profesi Hukum Indonesia, 2018-sekarang.
32. Dewan Redaksi Buletin Informasi Sekitar Universitas Tarumanagara (INSTA) 2016- sekarang.
33. Penanggung jawab Penyusunan Pedoman MBKM Untar TAahun 2021.
34. Dewan Redaksi Majalah T-Magz Universitas Tarumanagara tahun 2016-sekarang.
35. Penasehat Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Komisariat Universitas Tarumanagara, 2016-sekarang.
36. Editor Buletin Kolom Pintar Untar tahun 2018-sekarang.
37. Wakil Rektor I: Bidang Akademik tahun 2020 – 2024.
38. Sekretaris Senat Universitas Tarumanagara tahun 2016-sekarang
39. Ketua Tim Komite Evaluasi dan Kelulusan Program Doktor Universitas Taruanatara tahun 2018-sekarang.
40. Pengusus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah III Jakarta, 2020-sekarang.
41. Pengurus Perkumpulan Profesi Pengacara Dan Praktisi Pajak Indonesia (P5i), 2022-sekarang.
42. Ketua atau anggota Tim atau panitia berbagai kegiatan lainnya.

**Penelitian/Penulisan :**

1. Penelitian tentang Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tahun 1991.
2. Ilmu Perundang-undangan, Buku Ajar, Jakarta: Lemlit Untar, 1996.
3. Teknik Perundang-undangan, Buku Ajar, Jakarta, Lemlit Untar, 1996.
4. Politik Hukum Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya, Buletin Tarumanagara No. 3/Th.9/April 1994.
5. Mencari Alternatif Masa Jabatan Presiden dan Pengaturan Hukumnya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 1/Th.1/Juli 1994.
6. Kekuasaan Presiden di Bidang Perundang-undangan Menurut Undang-undang Dasar 1945, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 3/Th.1/Januari 1995.
7. Kebijakan Administrasi sebagai Instrumen Efektivitas Layanan Publik, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 4/Th.1/April 1995.
8. Konsep Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 5/Th.II/Juli 1995.
9. Pengaruh Surat Ketua Mahkamah Agung Terhadap Putusan Peradilan, Juenal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 7/Th.II/Januari 1996.
10. Hukum sebagai Alat Pembaharuan Sosial dan Masalahnya, Buletin Tarumanagara Edisi No. 34/TH.10/Juni 1996.
11. Pengendalian Pencemaran Air Kali di Jakarta, Buletin Ilmiah Tarumanagara No. 35/Th.10/Oktober 1996.
12. Sistem Pengaturan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 9/Th.III/Juli 1996.

13. Korelasi Aspirasi Antara Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 11/Th.III/ Januari 1997.
14. Materi Muatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Cara Menemukannya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 12/Th.III/April 1997.
15. Fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Mengantisipasi Kebutuhan Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 13/Th.IV/Juli 1997.
16. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak Asasi Manusia (Suatu Pemikiran), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 13/Th.IV.Oktober 1997.
17. Reformasi Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 16/Th.IV/April 1998.
18. Analisis Yuridis Pemilu 1999 dan Pemerintahan Baru yang Legitimit, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. IV/Th.V/April 1999.
19. Ekuivalensi Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Aspirasi Rakyat dalam Pemilihan Presiden, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 1/Th.IV/Juli 1999.
20. Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Presiden (Kajian Terhadap Kasus Pemberhentian Menteri), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 3/Th.VII/Januari 2001.
21. Legalitas Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 4/Th.VII/April 2001.
22. Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPPENAS, tahun 2002.
23. Mengenal Mahkamah Konstitusi dalam Paham Undang-undang Dasar 1945, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 1/Th.IX/September 2002.
24. Analisis terhadap Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 2/Th.IX/Januari 2003
25. Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Jurnal Ilmian Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 1/Th.13/September 2005. ISSN: 0854-8242, terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 56/Kep/DIKTI/2005.
26. Strategi Kebijakan Pengaturan Sistem Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Makalah, disampaikan pada Diskusi Panel Sistem Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diselenggarakan oleh FT Jurusan Sipil Untar bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 26 Juli 2006.
27. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 3/Th.13/Mei 2006. ISSN: 0854-8242, terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 56/Kep/DIKTI/2005.
28. Kajian terhadap Intervensi Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Edisi No. 2/Th.14/Januari 2007. ISSN: 0854-8242, terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 56/Kep/DIKTI/2005.

29. Kajian Terhadap Pasal 185 Ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah, disampaikan pada Diskusi Terfokus tentang Pendalaman terhadap Ketentuan Pasal 185 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pembatalan Perda APBD oleh Menteri Dalam Negeri, Diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta, 28 September 2007.
30. Pemberlakuan Ketentuan UU yang bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Era Hukum Edisi 1/Th.15/September 2007. ISSN: 0854-8242, terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 56/Kep/DIKTI/2005.
31. Penelitian Hukum tentang Pengawasan dan Pembinaan Notaris, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Azasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tahun 2009.
32. Penelitian Hukum tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dihubungkan dengan Inisiatif untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, LPPI tahun 2011.
33. Penelitian Hukum tentang Korelasi Penggunaan Hak Pilih dengan Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten di Indramayu, LPPI tahun 2011.
34. Penelitian Hukum tentang Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia, LPPI 2012.
35. Penelitian Hukum tentang Analisis Yuridis Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia, LPPI 2012.
36. Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia (Objek Kajian Surat Edaran Pemerintah), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Era Hukum, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016
37. Penelitian, Pengujian Surat Edaran Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia, DPPM 2017.
38. Penelitian, Pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, 2017.
39. Penelitian, Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, DPPM 2018.
40. Penelitian, Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu, DPPM 2018.
41. Penelitian, Reformasi Kebijakan Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Pandeglang Banten, DPPM 2018
42. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019.
43. Penelitian Praktik Penyelesaian Tambang Galian Illegal dan Dampak Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019
44. Penelitian Pengendalian Hukum Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dan Provinsi Banten, DPPM 2020
45. Penelitian Penerapan Peraturan Kebijakan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, DPPM 2020.

46. Penelitian Kebijakan Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Ngarot Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2020.
47. Penelitian Paradigma Demokrasi Pada Praktik Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021, DPPM 2021
48. Menulis buku “Mengatur Urusan Pemerintahan Melalui Peraturan Kebijakan” dalam BookChapter berjudul “Berhukum Di Masa Pandemi Covid-19”, Penerbit: LPPM Untar (Untar Press), 2021.
49. Penelitian tentang “Tumpang Tindih ZEE Laut Natuna Udara Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan RRC”, LPPM. 2022.
50. Penelitian tentang “Dampak Hukum Bekerja Sebagai TKI Di Luar Negeri Terhadap Kebahagiaan Rumah Tangga (Syudi TKI Asal Indramayu)”, DPPM, 2022.
51. Penelitian tentang “Pelaksanaan Kebijakan Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Perceraian Di Kabupaten Indramayu”, LPPM, 2022.
52. Penelitian tentang “Penggunaan Peraturan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Di Kabupaten Indramayu”, LPPM, 2022.
53. Menulis buku berjudul “Pemulihan Industri Penerbangan Dan Pariwisata Global Dan Nasional, Dua Bahasa Indonesia & Inggris”, Penerbit: CV Eureka Media Aksara, 2022.
54. Menulis buku berjudul “KTT G20 Indonesia 2022, Perang Rusia VS Ukraina, Pengamanan Dan Gender”, Penerbit: CV Eureka Media Aksara, 2022.
55. Menulis buku berjudul “Aspek Hukum Transportasi Udara Embarkasi Haji / Umroh BIJB Kertajati Jawa Barat”. Penerbit: CV Eureka Media Aksara, 2022.
56. Penelitian tentang “Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Anak DI Kabupaten Indramayu Pada Periode 2019-2022”, LPPM, 2023.
57. Menulis buku berjudul “Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia, Problematika, Praktik, dan Bangunan Hukum”, Penerbit Adni, tahun 2023.
58. Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Dispensasi Perkawinan Di Masyarakat Kabupaten Indramayu”, LPPM, 2023.
59. Penelitian tentang Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat DI Daerah Kabupaten Indraayu, LPPM, 2024.
60. Penelitian tentang Faktor Penyebab Perceraian Pasangan Nikah DI Kabuaten Indramayu Pada Periode 2021-2023, LPPM, 2024.
61. Aktif menulis buku, artikel yang dipublikasikan di Jurnal Internasional, jurnal internasional terindeks scopus, jurnal nasional terakreditasi Sinta.

**Pengabdian Kepada Masyarakat :**

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Desa di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Jawa Barat, DPPM 2016
2. Pelatihan Legal Preneurship Usaha Jasa Wisata Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, DPPM 2017.

3. Kapasiti Building Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Ranting Panimbang Pandeglang Banten, DPPM 2017.
4. Sosialisasi Aspek Hukum Kepariwisata Wilayah Pesisir Bagi Remaja, Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Padeglang Banten, DPPM 2017
5. Sosialisasi Aspek Hukum Kepariwisata Wilayah Pesisir Bagi Remaja, Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Padeglang Banten, DPPM 2017.
6. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Bidang Pertambangan di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat, DPPM 2018.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Kalianda Lampung Selatan Bidang Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara, dan Hukum Bisnis, DPPM 2018.
8. Bimbingan Teknik Penguatan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2018.
9. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019.
10. Latihan Dasar Kepemimpinan tentang Pengenalan Diri Sebagai Dasar Pengembangan Diri di SMA Ketapang 3 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, 10 Desember 2020.
11. Latihan Dasar Kepemimpinan tentang Menegakan Diri Sebagai Basis Pembinaan Pengembangan Pribadi, di SMK Yusuf Jakarta 16 November 2021.
12. Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi” pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Indramayu, Mei 2022.
13. Bimbingan Hukum Keluarga Bahagia Di Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu”, November 2022.
14. Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Mei 2022.
15. Bimbingan Teknis Menghitung Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Desa Tamansari Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, November 2022.
16. Pembinaan Hukum Perkawinan Pada Remaja Sekolah Dalam Rangka Menunjang Pencapaian Cita-Cita Di Kabupaten Indramayu, Juli 2022.
17. Pembinaan Perilaku Hukum Para Remaja Sekolah Untuk Mewujudkan Cita-Citanya Di Kabupaten Indramayu, LPPM, 2023.
18. Membangun Keluarga Kekal Dan Bahagia Pada Masyarakat Desa Tukdana Kabupaten Indramayu, LPPM, 2024.

Jakarta, 25 September 2024

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H